



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2018 telah selesai disusun.

Buku ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntailitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja. Penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2018, disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah memuat langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di kabupaten Kebumen.

Kebumen, Januari 2019

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis Organisasi	3
1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	6
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)	6
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	16
4.2. Permasalahan/Kendala	
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai tingkat Provinsi/Nasional	
4. Lain-lain	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 : Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
2. Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
3. Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
4. Tabel 2.3 : Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
5. Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2018
6. Tabel 2.5 : Program/Kegiatan Tahun 2018
7. Tabel 3.1 : Capaian Kinerja tahun 2018
8. Tabel 3.2 : Evaluasi kinerja Tahunan
9. Tabel 3.3 : Capaian kinerja berdasar target dan realisasi kinerja
10. Tabel 3.4 : Capaian indikator kinerja sasaran strategis BPBD s/d Tahun 2018
11. Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran tahun 2018

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, sedangkan anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Kebumen

2. Sekretariat

a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan
 - b. Kepala Seksi Logistik dan peralatan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekonstruksi

BAGAN ORGANISASI BPBD



1.2. Fungsi Strategis Organisasi

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007, Badan penanggulangan Bencana daerah terdiri atas unsur :

1. Pengarah Penanggulangan bencana, yang beranggotakan pejabat pemerintah terkait serta anggota masyarakat profesional dan ahli untuk :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
2. Pelaksana penanggulangan bencana, yang beranggotakan tenaga profesional dan ahli mempunyai fungsi :
 - a. Fungsi koordinasi, adalah fungsi yang melekat pada unsur pelaksana BPBD Kabupaten untuk melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya, termasuk BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB.
 - b. Fungsi komando, adalah fungsi Unsur Pelaksana BPBD dalam rangka penanganan darurat bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya.
 - c. Fungsi pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, adalah fungsi Unsur Pelaksana BPBD menjadi pelaksana dalam penanganan tanggap darurat bencana dan pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Kebijakan nasional dalam rangka penanggulangan bencana yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi bencana, sedangkan sasaran yang ingin dituju adalah ***“Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”***.

Penerapan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen tentu saja tidak terlepas dari perkembangan lingkungan eksternal baik lokal/regional, nasional maupun internasional. Isu-isu strategis eksternal terkait penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
	Kesepakatan di tingkat global yang mengukung konsep pengurangan risiko bencana seperti Hygo Framerwork for Action 2005 - 2015 yang dilanjutkan menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.	1. Semangat nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan. 2. Bencana dan Kebakaran telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan dimaksud sesuai dengan pasal 12 ayat (1) UU 23/2014	Diundangkannya perda : 1. Perda No.4 th 2014 tentang Penanggulangan Bencana di kab. Kebumen. 2. Perda No.1 Th 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kab. Kebumen	1. Perda RT/RW dan Dokumen KLHS belum dilaksanakan dengan baik, terkait Pembangunan pada Daerah Rawan Bencana. 2. Dunia Usaha memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam penanggulangan bencana melalui CSR

Perwujudan yang mendasar dalam penerapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen adalah terbangunnya kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Semangat ditataran global telah dicerminkan dalam Konfensi Dunia PRB ke-3 di Sendai yang dinaungi oleh Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana. Indonesia telah menyampaikan tantangan terkait dengan tata kelola dalam kebencanaan dengan semakin meningkatkan berbagai permasalahan pembangunan di era saat ini.

Tantangan berupa upaya pengurangan kemiskinan, kerusakan lingkungan, urbanisasi, air bersih, serta isu perubahan iklim dengan kejadian kebencanaan yang semakin meningkat. Indonesia telah berupaya dengan meletakkan peraturan perundangan terkait dengan bencana, kelembagaan kebencanaan dari tingkat nasional hingga daerah, perencanaan kebencanaan, menjalin kemitraan dengan berbagai multi pihak di bidang bencana, dan membangun ketangguhan dari kepemimpinan dan keterlibatan secara inklusif untuk tata kelola kebencanaan di Indonesia. Tantangan yang cukup besar adalah sebagai “Negara Kepulauan” yang berawasan Nusantara, pemanfaatan modal budaya dan sosial menjadi penting dalam tata kelola kebencanaan. Hal ini masuk dalam dokumen SFDRR 2015-2030 yang ditetapkan sebagai Negara kepulauan menjadi karakteristik yang spesifik, karena memiliki risiko dan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara daratan.

Terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, dengan melibatkan unit Perangkat Daerah lainnya, masyarakat dan dunia usaha.

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Bupati Kebumen terpilih, maka BPBD Kabupaten Kebumen menetapkan strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.			
Misi 6 :			
Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen	Peningkatan capaian kinerja pelayanan lembaga dan aparatur pada BPBD Kabupaten Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM BPBD 2. Menjaga ketersediaan SarPras Penanggulangan Bencana. 3. Menyediakan data informasi kebencanaan yang valid. 4. Mensinergikan program pembangunan dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara rutin. 2. Memelihara Kondisi Sarpras Penanggulangan Bencana dalam kondisi baik 3. Menyediakan Data Base Bencana 4. Mendorong adanya pengarusutamaan

		<p>penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait</p> <p>5. Menjamin pemenuhan kebutuhan penanggulangan bencana.</p> <p>6. Melibatkan Dunia Usaha untuk turut melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Bencana.</p>	<p>PRB dalam Kegiatan Perangkat Daerah Terkait</p> <p>5. Memberikan pelayanan penanggulangan bencana</p> <p>6. Bekerjasama dengan Dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana</p>
<p>Misi 2 :</p> <p>Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik, berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat</p>			
<p>Mewujudkan Kabupaten Kebumen yang Tangguh Bencana</p>	<p>Peningkatan kapasitas lembaga BPBD Kabupaten Kebumen serta Masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana</p>	<p>1. Mengajak Masyarakat untuk lebih mengutamakan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana untuk meminimalisir timbulnya korban</p> <p>2. Menjamin ketersediaan Bantuan logistik kebencanaan</p>	<p>1. Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada Daerah Rawan Bencana.</p> <p>2. Menyediakan Sistem peringatan dini bencana yang memadai.</p> <p>3. Menjalinkan hubungan baik dengan organisasi relawan</p> <p>4. Menyediakan logistik</p>

			kebencanaan yang dibutuhkan dalam Penanggulangan Bencana
	Berfungsinya kembali infrastruktur / Sararana dan prasarana umum dan perumahan yang rusak akibat bencana serta pemuliahan dampak yang ditimbulkan.	1. Menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum masyarakat dan perumahan	1. Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana umum/ infrastruktur serta perumahan 2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021, BPBD Kabupaten Kebumen memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Taget Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (2021)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Presentase desa tangguh bencana	10%	17,14%	24,29%	31,43%	38,57%	45,71%	45,71%

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Kebumen Tahun 2016-2021, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Kebumen selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.3

Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Indikator kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2021
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	Target	Rp.000,-	
Berfungsinya kembali jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana	unit	-	7	10.582.036	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48
Prosentase desa siaga/tangguh bencana	%	5,24	8,1	1.112.755	10,95	2.060.000	13,81	2.104.000	17,14	2.216.400	20,95	2.262.540	25,24	2.497.794	25,24
Berfungsinya kembali secara normal tebing sungai yang rusak akibat bencana	Unit	-	7	3.812.135	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	38
Banyaknya rumah yang mendapat bantuan perbaikan pasca bencana	Rumah	-	100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	100	292.820	100	322.102	100
Tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis akibat bencana dan bantuan logistik korban bencana	bulan	-	12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.550.000	12	2.600.000	12	2.650.000	12	2.700.000	60

2.1.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2018 Kepala Pelaksana BPBD kabupaten kebumen yang didalamnya memuat Sasaran Strategis yang akan dituju, serta Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Kebumen yaitu rencana

pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana sebanyak 8 desa sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	8 Desa	8 Desa	0	4	4	0

Anggaran yang di sediakan untuk mencapai taget Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah serta indikator kinerja sasaran strategis, termuat dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Program/Kegiatan Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.152.652.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	5.364.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	55.000.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	60.000.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	415.848.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	70.000.000
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	40.000.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	50.000.000

8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	39.136.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12.000.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5.251.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	35.083.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	248.160.000
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	116.810.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.212.500.000
14	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2 unit	750.000.000
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16 unit	50.000.000
16	Pengadaan peralatan gedung kantor	16 unit & 1 paket	85.000.000
17	Pengadaan Meubelair	80 unit	120.000.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 paket	200.000.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	1 paket	7.500.000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000
20	Pendidikan dan pelatihan formal	12 orang	55.000.000
IV	Program pengembangan data/informasi		70.000.000
21	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	2 dokumen	20.000.000
22	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan kawasan rawan bencana	1 dokumen	50.000.000
V	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah		10.000.000
23	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	2 dokumen	10.000.000
VI	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		2.591.600.000
24	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	12 kali	2.316.600.000
25	Pengadaan logistik bantuan kebencanaan	625 paket	275.000.000

VI	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		130.000.000
26	Penyiapan tenaga pengendali kewanaman dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	130.000.000
VII	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		1.968.000.000
27	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	2 Kegiatan	300.000.000
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	1 paket	121.000.000
29	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	50 orang	168.000.000
30	Droping Air Bersih	1450 tanki	350.000.000
31	Pelatihan penanggulangan bencana	60 orang	70.000.000
32	Penyusunan peta resiko rawan bencana	2 kec	100.000.000
33	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	8 desa	415.000.000
34	Fasilitasi forum pengurangan risiko bencana (PRB) dan relawan	2 kegiatan	80.000.000
35	Pengembangan Sekolah aman bencana	3 sekolah	150.400.000
36	Pelatihan Tehnis Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	60 orang	209.000.000
VIII	Program tanggap darurat jalan dan jembatan		2.050.000.000
37	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	2 paket	2.050.000.000
IX	Program pengendalian banjir		1.750.000.000
38	Pembangunan infrastruktur pengairan pasca bencana alam	2 paket	1.750.000.000
X	Program Perbaikan Rumah akibat bencana alam/sosial		200.718.000
39	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	1 paket	242.000.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		11.231.752.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target kinerja organisasi yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah tahun 2018 yaitu pembentukan desa tangguh bencana sebanyak 8 desa telah terlaksana 100 %, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	8 desa	8 desa
		1. Ds Kr duwur (Ayah) 2. Ds. Pasir (Ayah) 3. Ds. Tlogodepok (Mirit) 4. Ds. Entak (Ambal) 5. Ds. Seboro (Sadang) 6. Ds. Kalirejo (Kr. Gayam) 7. Ds. Blater (Poncowarno) 8. Ds. KrSambung (Kr.Sambung)	1. Ds Kr duwur (Ayah) 2. Ds. Pasir (Ayah) 3. Ds. Tlogodepok (Mirit) 4. Ds. Entak (Ambal) 5. Ds. Seboro (Sadang) 6. Ds. Kalirejo (Kr. Gayam) 7. Ds. Blater (Poncowarno) 8. Ds. KrSambung (Kr.Sambung)

Capaian Indikator kinerja Utama BPBD Kabupaten Kebumen apabila disandingkan dengan capaian tahun-tahun yang lalu sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2. Evaluasi kinerja Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Target s/d 2021	Realisasi sampai dengan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	45,7 % (95 desa)	10,9%	12,8%	16,6%			
Desa rawan bencana sejumlah : 210 Desa								

Capaian Indikator kinerja Utama BPBD Kabupaten Kebumen apabila disandingkan dengan target cataan jangka dalam Renstra tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.3

Capaian kinerja berdasar target dan realisasi kinerja

Indikator Kinerja Utama	Realisasi sampai dengan tahun											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	realis asi
Persenta se desa Siaga/Ta ngguh Bencana	10 %	10,9 %	17,14 %	12,8 %	24,29%	16,6 %	31,43%		38,57 %		45,7 1%	

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2018, dari target 24,29 % baru tercapai 16,6%, sehingga masih terdapat deviasi pencapaian target sebesar 7,69%. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya Fasilitas Desa tangguh bencana yang ada.

3.1.2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis.

Dalam rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021, disamping melaksanakan kegiatan yang outputnya bisa di ukur dan dievaluasi antara target dan realisasinya, seperti kegiatan pembentukan / pembinaan desa tangguh bencana, yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dilaksanakan pula kegiatan penanganan bencana pada kondisi darurat, yang dalam perencanaan anggaran hanya bersifat penyediaan untuk mengantisipasi kejadian bencana yang mungkin terjadi.

Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masyarakat pasca bencana juga merupakan sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen yang lokasi pelaksanaan berdasarkan hasil kajian dan survei yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kebumen.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada BPBD Kabupaten Kebumen sampai sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.4
Capaian indikator kinerja sasaran strategis BPBD
s/d Tahun 2018

Indikator kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir 2021
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			Target	Realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	
Berfungsinya kembali jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana	paket	-	7	7	5	1	8	2	8		10		10		48
Prosentase desa siaga/tangguh bencana	%	5,24	10	10,9%	17,14%	12,8%	24,29%	16,6%	31,43%		38,57%		47,71%		47,71%
Berfungsinya kembali secara normal tebing sungai yang rusak akibat bencana	Paket	-	7	7	5	1	8	2	8		10		10		38
Banyaknya rumah yang mendapat bantuan perbaikan pasca bencana	paket	-	1	1	1	1	1	1	1		1		1		6
Tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis akibat bencana dan bantuan logistik korban bencana	bulan	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	72

3.1.3. Realisasi Anggaran.

BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 melaksanakan 10 program yang terbagi kedalam 39 kegiatan, dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11.231.752.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.829.132.035,00 (87,51 %) dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran tahun 2018

	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.152.652.000	988.556.645	164.095.355	85,76
1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.364.000	4.694.900	669.100	87,53
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.000.000	41.487.434	13.512.566	75,43
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000	36.599.000	23.401.000	61,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	415.848.000	328.774.983	87.073.017	79,06
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.000.000	69.817.300	182.700	99,74
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000	39.716.000	284.000	99,29
7	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	47.282.800	2.717.200	94,57
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.136.000	38.529.550	606.450	98,45
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	11.996.000	4.000	99,97
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.251.000	3.286.000	1.965.000	62,58
11	Penyediaan makanan dan minuman	35.083.000	35.068.800	14.200	99,96
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	248.160.000	246.858.878	1.301.122	99,48
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	116.810.000	84.445.000	32.365.000	72,29
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.267.500.000,00	1.254.409.742,00	13.090.258,00	98,97
14	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	750.000.000,00	747.064.000,00	2.936.000,00	99,61
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	49.990.000,00	10.000,00	99,98

16	Pengadaan peralatan gedung kantor	85.000.000,00	80.917.000,00	4.083.000,00	95,20
17	Pengadaan mebeleur	120.000.000,00	116.501.000,00	3.499.000,00	97,08
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	198.477.742,00	1.522.258,00	99,24
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.500.000,00	7.460.000,00	40.000,00	99,47
20	Pendidikan dan pelatihan formal	55.000.000,00	54.000.000,00	1.000.000,00	98,18
III	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	2.050.000.000,00	1.599.287.000,00	450.713.000,00	78,01
21	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	2.050.000.000,00	1.599.287.000,00	450.713.000,00	78,01
IV	Program Pengendalian Banjir	1.750.000.000,00	1.349.058.400,00	400.941.600,00	77,09
22	Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam	1.750.000.000,00	1.349.058.400,00	400.941.600,00	77,09
V	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	242.000.000,00	207.080.732,00	34.919.268,00	85,57
23	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	242.000.000,00	207.080.732,00	34.919.268,00	85,57
VI	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	130.000.000,00	125.177.230,00	4.822.770,00	96,29
24	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	130.000.000,00	125.177.230,00	4.822.770,00	96,29
VII	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.968.000.000,00	1.757.055.511,00	210.944.489,00	89,28
25	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	300.000.000,00	260.875.500,00	39.124.500,00	86,96
26	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	121.000.000,00	118.200.350,00	2.799.650,00	97,69
27	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	168.000.000,00	157.137.900,00	10.862.100,00	93,53
28	Droping Air Bersih	350.000.000,00	340.165.083,00	9.834.917,00	97,19
29	Pelatihan penanggulangan bencana	70.000.000,00	61.158.328,00	8.841.672,00	87,37

30	Penyusunan peta resiko rawan bencana	100.000.000,00	77.441.000,00	22.559.000,00	77,44
31	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	419.600.000,00	384.257.900,00	35.342.100,00	91,58
32	Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan	80.000.000,00	60.195.900,00	19.804.100,00	75,24
33	Pengembangan sekolah aman bencana	150.400.000,00	127.377.450,00	23.022.550,00	84,69
34	Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	209.000.000,00	170.246.100,00	38.753.900,00	81,46
VIII	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.591.600.000,00	2.487.616.475,00	103.983.525,00	95,99
35	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	2.316.600.000,00	2.235.653.600,00	80.946.400,00	96,51
36	Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	275.000.000,00	251.962.875,00	23.037.125,00	91,62
IX	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	9.880.500,00	119.500,00	98,81
37	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	10.000.000,00	9.880.500,00	119.500,00	98,81
X	Program pengembangan data/informasi	20.000.000,00	19.856.800,00	143.200,00	99,28
38	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	20.000.000,00	19.856.800,00	143.200,00	99,28
39	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	50.000.000,00	31.153.000,00	18.847.000,00	62,31
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	11.231.752.000,00	9.829.132.035,00	1.402.619.965,00	87,51

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang didalamnya memuat Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah melalui pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 secara umum sudah terlaksana dengan baik, terlihat dengan capaian belanja langsung sebesar 87,51%, namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang kurang maksimal pada pelaksanaannya yang disebabkan karena kurang cermatnya dalam penetapan target pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga terjadi kendala pada pelaksanaan kegiatannya.
- b. Capaian Indikator kinerja utama perangkat daerah sampai dengan tahun 2018, yaitu pembentukan desa tangguh bencana dari target capaian 24,29 % baru tercapai sebesar 16,6 %. Kegiatan pembentukan tangguh bencana kedepan harus mendapatkan perhatian lebih serius mengingat target capaian sampai dengan akhir periode renstra sebesar 45,71 %, yang berarti masih diperlukan upaya keras untuk mencapainya.
- c. Pelaksanaan tanggap darurat bencana di kabupaten kebumen sudah terlaksana dengan baik karena dukungan Anggaran APBD kabupaten Kebumen, disamping peran serta dari masyarakat dan dunia usaha yang sudah cukup baik.
- d. Upaya penanganan bencana pada tahap pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah semakin baik, yang di sebabkan sudah adanya koordinasi yang baik dengan perangkat Daerah terkait dalam hal penentuan lokasi kegiatan dan pembagian kewenangan penanganannya.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala utama yang terjadi dalam pelaksanaan program /kegiatan di tahun 2018 di BPBD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten kebumen didalam menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana dari sisi Sumber Daya Manusia adalah masih terbatasnya pegawai yang memiliki kapasitas yang

diperlukan baik dari sisi perencanaan kegiatan kebencanaan dan pelaksanaannya, penyusunan regulasi sebagai turunan perda penanggulangan bencana yang sudah ada. Selain itu BPBD kabupaten kebumen juga masih sangat kekurangan pegawai/staff guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif.

- b. Pelaksanaan kegiatan Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana masih terkendala oleh ketersediaan Fasilitator yang memiliki kapasitas yang baik untuk mendorong/memotivasi pemerintah desa dan masyarakatnya. Selain itu kendala yang dihadapi oleh fasilitator desa tangguh bencana ialah bahwa pelaksanaan sosialisasi dan asistensi pembentukan desa tangguh bencana kepada masyarakat sering terkendala dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang harus disesuaikan dengan ketetersedian waktu peserta.
- c. Pelaksanaan kegiatan kedaruratan akan mengalami kendala manakala terjadi musibah/bencana yang cukup masif dan meluas salah satunya personil yang terspesialisasi / memiliki keahlian spesifik untuk penyelamatan dan evakuasi, ini disebabkan karena keterbatasan personil BPBD, PUSDALOPS serta relawan yang pada kondisi tanggap darurat untuk di dorong menjadi POSKO Lapangan serta untuk melaksanakan kaji cepat untuk menghitung kerugian dan kerusakan yang di akibatkan bencana.
- d. Pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana terkendala pada penanganan infrastruktur yang bukan merupakan kewenangan desa atau kabupaten, dimana kerusakan tersebut tidak bisa langsung diperbaiki secara permanen, mengingat bukan kewenangannya, padahal masyarakat sebagai pengguna infrastruktur berkeinginan agar kerusakan segera dapat diperbaiki.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dengan melihat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya yang terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui serta agar lebih meningkat kinerjanya di tahun yang akan datang perlu ditempuh beberapa hal berikut ini :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai Renstra dengan lebih mencermati sasaran dan pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi semakin efektif.

2. Sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan baik oleh pemerintah Kabupaten Provinsi maupun Pusat.
3. Mengelola sarana prasarana dan SDM yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas dan RKO masing masing kegiatan.
5. Meningkatkan keterlibatan stakeholder terkait dan satuan kerja lainnya guna mengembangkan pengelolaan Kebencanaan.
6. Mendorong desa untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana melalui APBDesa untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD Kabupaten.